

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2013, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harry Budiarto, 1982, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia, Jakarta.

Suratman, Philips Dillah, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Alfabeta, Bandung.

Eddy Hiarij, 2017, "*Hukum Acara Pidana*", Universitas Terbuka, Tangerang.

Lexy Moloeng, 2005, "*Metode Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Noeng Muhadjir, 2013, "*Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Kebijakan*", Rake Sarakin, Yogyakarta.

Moh Nazir, 2008. "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

Priyatno, 2006, "*Pidana Penjara Di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung.

Winanti, 2020, "*Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia*". Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Jurnal/Artikel:

Akib, 2010 "*Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*", Jurnal Administrasi Publik, halaman 3.

Wibowo, 2021, "*Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona*". *Nusantara*, vol. VIII, halaman 200-206.

Faiz, 2020, "*Memaknai Salus Populi Suprema Lex*", Majalah Konstitusi, halaman 68-69.

Asmakul Hosnah, 2019, "*Diskresi Dalam Perspektif Hukum Pidana*" ,*Justicia Sains*, vol.4 no. 2.

United Nations News, 2020, "*UN Rights Chief Urges Quick Action By Governments To Prevent Devastating Impact of COVID-19 In Places of Detention*" Retrieved 2021, from United Nations News: <http://news.un.org/en/story/2020/03/1060252>

Septiadi, 2020, "*Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan*", *JMO*, halaman 182.

Siagian R, 2020, "*Implikasi Kebijakan Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Masa Pandemi Covid-19*", *to-ra Jurnal Hukum*, halaman 138.

Trisnawati N, 2020, "*Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*", *Dinamika*, halaman 1765-1774.

WHO,2020, "*Statement on The Second Meeting of The International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding The Outbreak of Novel Coronavirus(2019-nCov)*", Retrieved April 2021, from World Health Organization: [https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))

Organization, W. H. ,2019, "*Naming The Coronavirus Disease (COVID-19) and The Virus That Causes It*", Retrieved from World Health Organization: [http://www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-19\)-and-the-virus-causes-it](http://www.who.int/emergencies/disease/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-19)-and-the-virus-causes-it)

Perundang-undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Sistem Data Base Pemasarakatan Laporan UPT Rutan Jepara Tahun 2021.

